

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia kita perlu melaksanakan pembangunan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Secara umum kita ketahui bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus-menerus berlangsung dan berkesinambungan memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara materil maupun spiritual yang mencakup di segala bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pelaksanaannya biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan dana yang banyak (Kurnianingsih, 2017).

Pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta kemakmuran rakyat (David, 2015). Menurut Indriyani (2018), pajak juga merupakan kontribusi yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara pembangunan nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No. 28 Tahun 2007).

Penerimaan pajak di Indonesia terdiri berbagai macam seperti penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), cukai dan pajak

lainnya. PPN dan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata sebesar 32,6 persen sebagai penyumbang terbesar kedua (Wijaya, 2013). Menurut UU No 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi serta pajak atas penyerahan barang. Semakin banyak penyerahan barang atau jasa kena pajak semakin banyak transaksi barang sehingga semakin besar PPN.

Penelitian ini didukung juga oleh adanya fenomena tarif pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga, seperti Tarif pajak pph orang pribadi di Indonesia kisaran 5 sampai dengan 25 persen, tarif pajak badan di Indonesia 25 persen, di Filipina 30 persen. sedangkan di Thailand 37 persen. Tarif PPN di Indonesia 10 persen, sedangkan tarif PPN di Filipina 12 persen (Mutmainna, 2016). Selama Presiden Joko Widodo dan Presiden Jusuf Kalla menjabat, realisasi pajak tidak pernah mencapai target. Bahkan pada tahun 2018, penerimaan pajak mengukir rekor 10 tahun mengalami kekurangan penerimaan pajak (*shortfall*) atau realisasi pajak tidak pernah mencapai target. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip CNBC Indonesia, penerimaan pajak mencapai target terjadi pada tahun fiskal 2008. Pada tahun 2008, target penerimaan pajak sebesar Rp 535 triliun dan realisasi penerimaan pajak tahun 2008 mencapai Rp 571 triliun atau 106,7% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya kepada negara dengan melalui kebijakan pengampunan pajak (*tax*

amnesty). Dengan tarif lebih rendah dari pelaksanaan di negara lain, pemerintah berharap dapat memulangkan dana para wajib pajak yang selama ini parkir di luar negeri. Namun, kebijakan tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan pajak atau tidak mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak hanya 6 bulan tahun 2017. Meskipun menjadi pelaksanaan terbaik, kebijakan tersebut belum bisa menggenjot penerimaan hingga mencapai target yang ditetapkan. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak periode 2014-2017 :

- a) 2014 : Target Rp 1.072 triliun, realisasi Rp 985 triliun mencapai 91,9%.
- b) 2015 : Target Rp 1.294 triliun, realisasi Rp 1.055 triliun mencapai 81,5%.
- c) 2016 : Target Rp 1.539 triliun , realisasi Rp 1.283 triliun mencapai 83,4%.
- d) 2017 : Target Rp 1.283 triliun, realisasi Rp 1.147 triliun mencapai 89,4%.

(Sumber: www.cnbcindonesia.com).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada bulan September 2018 penerimaan pajak non migas sudah mencapai Rp 853,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak migas mencapai Rp 47,6 triliun, atau telah melampaui target yang ditetapkan. Data bendahara negara merinci lebih jauh, penerimaan PPh non migas mencapai dari target Rp 488 triliun atau 59,7%. Sementara itu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai dari target Rp 351,5 triliun atau 64,9%. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2018 akan kembali mengalami penerimaan sekitar Rp 70- Rp 73 triliun (Sumber: www.cnbcindonesia.com).

Sepanjang tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendorong perbaikan kinerja keuangan negara. Dua sektor ini membuat penerimaan negara tumbuh lebih tinggi dan lebih baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pertumbuhan positif penerimaan pajak ditopang pertumbuhan PPh non migas sebesar 14,25 persen dan PPN yang tumbuh 16 persen (Sumber: www.kompas.com).

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan saling keterkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dilakukan, maka akan semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan vital yang dilakukan negara maka harus diperlukan faktor eksternal dan internal untuk menjaga kegiatan konsumsi masyarakat yaitu penerimaan PPN tetap selalu terjaga. Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro negara dan faktor internalnya di bidang perpajakan itu sendiri (Herna, 2016). Variabel ekonomi makro yang terdapat dalam penelitian ini adalah inflasi, nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dari segi ekonomi mikronya kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki kesadaran dalam membayar PPN.

Angka inflasi merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi yang berfluktuasi tinggi menggambarkan kondisi tingkat produksi, distribusi, ketidakpastian nilai mata uang, dan arah perkembangan perekonomian sehingga dapat menimbulkan ekspektasi keliru dan

manipulasi yang dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya inflasi yang rendah juga tidak menguntungkan perekonomian karena menggambarkan rendahnya daya beli dan permintaan akan barang dan jasa yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian dan inflasi juga mempengaruhi penerimaan pajak (Sumber: www.babel.bps.go.id).

Kurs (nilai tukar) secara umum adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang dapat diukur atau dapat dinyatakan mata uang negara lain. Kurs juga sebagai perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran pada sekarang atau di masa depan antara dua mata uang negara yang berbeda. Jenis-jenis kurs yang sering kita temui seperti kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah (Sumber: www.maxmanroe.com).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah setempat tepat sasaran tujuannya sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat maka dapat meningkatkan kemakmuran rakyat sehingga permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran akan berkurang (Yarianti, 2017).

Kepatuhan sesuai dengan surat edaran direktur pajak tahun 2006 untuk menghitung kepatuhan dilihat perbandingan jumlah PKP yang melapor SPT dengan jumlah PKP yang terdaftar. Karena kepatuhan dilihat dari laporan SPT. Tujuan dari pelaporan SPT adalah sebagai bukti bahwa pembayarannya telah sesuai dan dipelaporan ditampilkan semua kredit pajak keluaran masukan,

penghasilan dan pajak yang dibayarkan harus sesuai perhitungannya. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pihak yang wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN (Mutmainna, 2016).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan topik penelitian saat ini memberikan hasil yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian David (2015), menemukan bahwa PKP yang ada di Kota Bitung cukup patuh terhadap kewajibannya membayar PPN di KPP Pratama Bitung. Hasil dari penelitian Herna (2016), inflasi dan jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN dan nilai tukar rupiah berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Lebih lanjut diungkapkan Kurnianingsih (2017), inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Inflasi berkorelasi sangat erat terhadap penerimaan PPN. Sementara itu hasil dari penelitian Li Luh (2018), pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian Sanyoto (2018), nilai tukar dan neraca perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Beberapa penelitian di atas menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sejenis. Meski demikian, penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain subjek penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi makro dan mikro terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Agar negara dapat mengidentifikasi tidak

tercapainya penerimaan PPN dan meminimalisir hal-hal yang menyebabkan turun penerimaan PPN. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan, maka skripsi ini mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Makro dan Mikro terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berapa permasalahan yang akan diungkapkan penulis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pengusaha kena pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN periode tahun 2011 sampai 2018 secara simultan dan parsial?”

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas masalah yang berkaitan dengan penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang. Inflasi, nilai tukar rupiah yang datanya penulis peroleh dari situs Bank Indonesia sedangkan pertumbuhan ekonomi penulis peroleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, penerimaan PPN diperoleh dari KPP Pratama Pangkalpinang.

2. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini sebagian besar dikembangkan oleh peneliti, selebihnya mengadopsi dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel sama dengan penelitian ini. Peneliti berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan telah melakukan beberapa kali perbaikan namun tetap memiliki kelemahan-kelemahan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang periode tahun 2011 sampai 2018 secara parsial dan simultan.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Kontribusi penelitian terbagi menjadi dua kontribusi yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis.

1.5.1 Kontribusi Teoritis

Dalam aspek teoritis, kontribusi penelitian adalah :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan serta mampu menjelaskan dan menggambarkan teori daya beli penerimaan PPN.
- b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan selanjutnya.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Dalam aspek praktis, kontribusi penelitian ini adalah :

- a. Sebagai masukan dan informasi faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN
- b. Meningkatkan penerimaan PPN serta menentukan kebijakan-kebijakan guna untuk memaksimalkan penerimaan PPN.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dibuat adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang dihadapi, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian yang dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka terhadap teori-teori yang berhubungan serta kerangka teoritis yang menjadi landasan dalam menyusun penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.